



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT KOMISI VII DPR RI
(BIDANG: ENERGI, RISET DAN INOVASI, SERTA INDUSTRI)**

- Tahun Sidang : 2022 – 2023
- Masa Persidangan : I
- Rapat : Ke – 24 (Dua Puluh Empat)
- Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dan RDPU
- Dengan : Dirjen Industri Agro Kemenperin RI, PT Wilmar Group, Dirut PT Smart, Tbk dan Dirut-Dirut 8 besar Perusahaan Produsen Minyak Goreng
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari, tanggal : Selasa, 13 September 2022
- Waktu : Pukul 13.00 WIBs.d 16.00 WIB
- Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I Lantai I, secara tatap muka dan *virtual*
- Acara : Penjelasan mengenai tata kelola industri CPO dan minyak goreng
- Ketua Rapat : Bambang Haryadi, SE
(Wakil Ketua Komisi VII DPR RI/ F.P. Gerindra)
- Sekretaris Rapat : Dra. Nanik Herry Murti
- Hadir : A. Pemerintah
1. Dirjen Industri Agro Kemenperin RI
- B. Stakeholder
1. Dirut PT Wilmar Group
2. Dirut PT Smart, Tbk
3. Dirut Musim Mas Group
4. Dirut PT Apical Group
5. Dirut Permata Hijau Group
6. Dirut PT Incasi Group
7. Dirut PT Salim Group
8. Dirut PT BKP Group
9. Dirut PT KPN (GAMA) Group
10. Dirut PT Wings Group
11. Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI)
12. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)
13. Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI)
14. Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI)
- C. 36 Orang Anggota dari 51 Orang Anggota Komisi VII DPR RI terdiri dari:
- 16 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir fisik
- 16 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir virtual
- 19 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat dan RDPU Komisi VII DPR RI pada Hari Selasa, 12 September 2022 dibuka pukul 13.50 WIB, dipimpin oleh Bambang Haryadi, SE, selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat dan RDPU Komisi VII DPR RI dengan acara:
 - Penjelasan mengenai tata kelola industri CPO dan minyak goreng

II. CATATAN RAPAT

1. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian RI melakukan peningkatan pengawasan yang ketat terhadap industri CPO dan minyak goreng dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan minyak goreng untuk masyarakat dengan harga yang wajar.
2. Komisi VII DPR RI mendorong Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian RI agar perusahaan industri CPO dan minyak goreng terdaftar sebagai anggota asosiasi dalam rangka memudahkan koordinasi dan pengawasan.
3. Dalam rangka mendalami lebih lanjut mengenai tata kelola industri CPO dan minyak goreng, Komisi VII DPR RI bersepakat untuk membentuk Panitia Kerja (Panja).
4. Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan dan data yang diminta anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan paling lambat tanggal 20 September 2022.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 16.00 WIB

Jakarta, 13 September 2022

KETUA RAPAT.

BAMBANG HARYADI, SE
A-109